

**LAPORAN
KINERJA**

TRIWULAN I

2024



BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

PUSAT RISET PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai sebuah unit kerja eselon III.b di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja Tahun Triwulan I 2024 telah disusun sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Dokumen LKj ini memuat laporan kegiatan BRPSDI selama periode Tahun 2024, termasuk informasi mengenai pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Selanjutnya, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban secara struktural kepada instansi yang di atasnya dan diharapkan dapat menjadi materi evaluasi yang berguna bagi BRPSDI.

Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKj ini. Harapan kami, laporan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan semua kegiatan BRPSDI selama Tahun 2024.

Pusat Jakarta, 3 April 2024
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



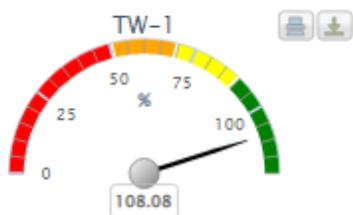
Iswan Ratna Astuti
124 199503 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Jatiluhur Triwulan I Tahun 2024 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BRPSDI Jatiluhur Triwulan I Tahun 2024 didasarkan pada penggunaan *Logical Framework Analysis* (LFA) sesuai dengan renstra BPPSDM tahun 2019-2024 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu outcome/impact dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan BRPSDI Jatiluhur selama tahun 2024.

Pada awal tahun 2024, BRPSDI Jatiluhur telah merancang dokumen "Perjanjian Kinerja BRPSDI Jatiluhur Tahun 2024" yang terdiri dari satu Sasaran Kegiatan dan sebelas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja BRPSDI Jatiluhur Triwulan I Tahun 2024 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat diakses melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Hasil pengukuran Indikator Kinerja BRPSDI pada triwulan I Tahun 2024 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **108,08%**, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKK.

Secara umum, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan termasuk dalam kategori Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dari sebelas IKM yang telah disetujui, keseluruhan IKM dapat diukur selama periode. Hasil validasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keempat IKM tersebut telah mencapai target periodik yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKM tersebut adalah sebagai berikut:

- I. IKM Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah), memiliki target tahunan yakni 2.000.000 Rupiah, target di periode triwulan I yakni 500.000 Rupiah. Nilai capaian PNBP per triwulan I yakni 4.813.840 Rupiah;
- II. IKM Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), memiliki target tahunan yakni 94%, target di periode triwulan I yakni 94%. Nilai capaian per triwulan I yakni 100%;

- III. IKM Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 82%, target di periode triwulan I yakni 82%. Nilai capaian per triwulan I yakni 82%;
- IV. IKM Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 100%, target di periode triwulan I yakni 100%. Nilai capaian per triwulan I yakni 100%;

Gambaran lengkap capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) BRPSDI selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN TW I 2024		%
			TARGET	REALISASI	
1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1 Nilai PNBPN BRPSDI (Rupiah)	2.000.000	500.000	4.813.840	120,00
	2 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%)	≤0,5			
	3 Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82			
	4 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	78,5			
	5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	94			
	6 Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	100,00	106,38
	7 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)	82	82,00	82,00	100,00
	8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	93,76			
	9 Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (Nilai)	82			
	10 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)	1			
	11 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)	100	100,00	100,00	100,00

Secara Umum, Nilai Kinerja BRPSDI hingga Tahun 2024 dapat dikategorikan Baik dengan skor 108.08. Capaian kinerja BRPSDI dari 4 Indikator kinerja yang dinilai pada triwulan I tahun 2024, sebanyak 2 indikator kinerja berhasil mencapai prosentasi capaian melebihi 100% dengan kisaran 106,38% hingga 120%, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya memperoleh

prosentase nilai 100%. Penjabaran detail mengenai capaian IKU akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Capaian kinerja BRPSDI pada triwulan I tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan arahan guna meningkatkan kinerja BRPSDI pada triwulan selanjutnya. Selama pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2024, BRPSDI telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah Proses perubahan nomenklatur kelembagaan yang masih belum terselesaikan, Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber pemasukan PNBPN BRPSDI. Adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah BRPSDI telah menyusun Naskah Akademik untuk membentuk suatu UPT baru dibawah BPPSDMKP untuk dapat mengakomodir pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki BRPSDI untuk memaksimalkan pencapaian kinerja pada tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL.....	7
I. PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Tujuan	9
1.3 Tugas dan Fungsi.....	9
1.4 Struktur Organisasi	11
1.5 Keragaan Pegawai	12
1.6 Sistematis Laporan Kinerja	14
1.7 Potensi dan Permasalahan	14
II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI	23
2.3 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2024	23
2.4 Pengukuran Kinerja	24
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2024.....	26
3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	27
3.3.Akuntabilitas Keuangan.....	43
3.4 Efisiensi Sumber Daya	50
IV. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut	52
4.3 Saran.....	52
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020.....	11
Gambar 2. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan PNS dan non PNS Tahun 2024.....	13
Gambar 3. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Tahun 2024.....	13
Gambar 4. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Tahun 2024 per tanggal 2 April 2024 Sumber: (http://kinerjaku.kkp.go.id). ...	26
Gambar 5. Realisasi Pendapatan Per Akun penerimaan per 29 Maret 2024 ...	29
Gambar 6. Upload informasi dalam format kegiatan di aplikasi coofis.	35
Gambar 7. Capaian IKK 6 pada satker lingkup Pusrisan.....	36
Gambar 8. <i>Screenshot</i> perjanjian kerjasama dengan UNTAG Cirebon sebagai kerjasama kemitraan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2024.....	12
Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2024.	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2024.....	23
Tabel 4. Capaian IKK 1 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	28
Tabel 5. Capaian IKK 2 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	30
Tabel 6. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	31
Tabel 7. Capaian IKK 4 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	33
Tabel 8. Capaian IKK 5 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	34
Tabel 9. Capaian IKK 6 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	35
Tabel 10. Capaian IKK 7. BRPSDI Tahun 2024.	37
Tabel 11. Capaian IKK 8. BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	39
Tabel 12. Capaian IKK 9. BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	39
Tabel 13. Capaian IKK 10 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	40
Tabel 14. Capaian IKU 11. BRPSDI Triwulan I Tahun 2024.....	42
Tabel 15. Hasil Perhitungan Capaian IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI Triwulan I Tahun 2024	43
Tabel 16. Realisasi anggaran BRPSDI berdasarkan jenis belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2024 per tanggal 29 Maret 2024 pada aplikasi SAKTI.....	44

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Eselon III.b di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BRPSDI berada dalam koordinasi dan supervisi dari Pusat Riset Perikanan (Pusriskan). Pusriskan merupakan salah satu unit organisasi eselon III di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020 yakni melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Laporan Kinerja BRPSDI Triwulan I Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerjanya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut dilakukan berdasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 8) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 10) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Baru di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 11) Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 12) Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
- 13) Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
- 14) Rencana Strategis BRPSDI Tahun 2020 – 2024, dan
- 15) Perjanjian Kinerja BRPSDI Tahun 2023.

Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI dalam rangka mewujudkan good governance, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di BRPSDI. Oleh karena itu, BRPSDI sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2024 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudin dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja (LKj) selama Triwulan I Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LKj Triwulan I Tahun 2024 BRPSDI disampaikan kepada Kepala BPPSDMKP melalui Kepala Sekretaris BPPSDMKP.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 “Badan Riset Sumberdaya

Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai saat ini KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020. BRPSDI mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 3 PER.80/MEN/2020 terkait tugasnya Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 2) Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, mencakup *restocking* sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerja sama riset;
- 4) Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Penyelenggaraan fungsi BRPSDI tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan serta dapat memberikan peran nyata dalam menunjang pembangunan nasional perikanan di perairan umum tawar dan laut. Monitoring terhadap potensi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan perairan tawar dan laut perlu dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Berdasarkan kegiatan monitoring tersebut akan diketahui status terkini perairan, sehingga bagi perairan yang mengalami kerusakan akibat eksploitasi sumber daya perairan yang berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung perairan perlu dilakukan penelitian dalam rangka pemulihan atau rehabilitasinya.

Keberadaan BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi

terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- 1) Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan,
- 2) Pemulihan sumber daya ikan,
- 3) Monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- 4) Perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

Dukungan hasil penelitian bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian ilmiah.

1.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja BRPSDI tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional peneliti, teknisi litkayasa, dan pustakawan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.686/BRSDM-BRPSDI/KP.440/VIII/2023, Kepala BRPSDI dibantu oleh 1 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan jumlah anggota sebanyak 14 orang untuk mewujudkan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian fungsi sebagai berikut :

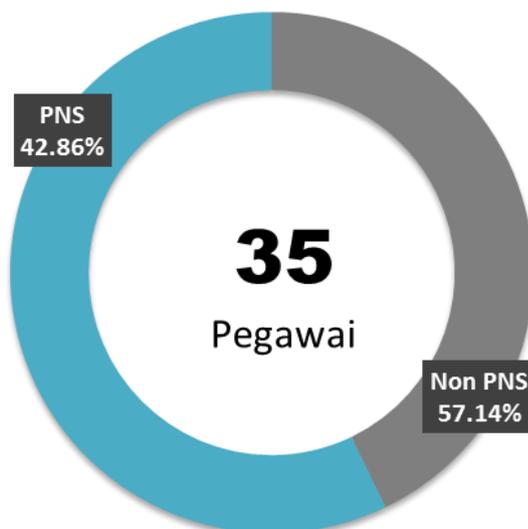
- Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial tersusun rapih
- Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan
- Kegiatan sesuai dengan perencanaan
- Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja
- Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
- Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

1.5 Keragaan Pegawai

Kondisi sumber daya manusia di BRPSDI Tahun 2024 adalah pegawai BRPSDI berjumlah 37 orang terdiri dari 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 pegawai kontrak dengan rasio 42,86% dan 57,14% (**Gambar 2**). Jumlah SDM yang terdapat di BRPSDI masih relatif ideal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Kondisi sumber daya manusia BRPSDI Tahun 2024 disajikan pada **Tabel 1**.

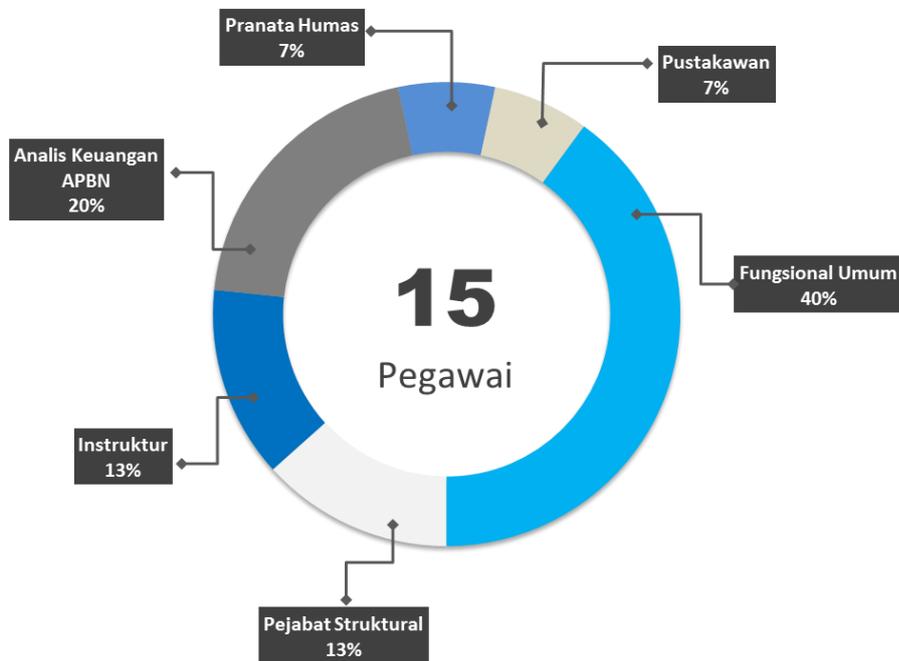
Tabel 1. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2024

No	Staf BRPSDI	Pegawai Negeri Sipil	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Pustakawan	1	-	1
6	Fungsional Umum	6	0	6
7	Pramubakti	-	13	13
8	Pengemudi	-	3	3
9	Satpam	-	4	4
Jumlah		15	20	35



Gambar 2. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan PNS dan non PNS Tahun 2024.

Peta sebaran fungsional dan non fungsional BRPSDI terdiri dari Instruktur (2 orang), Analis Keuangan APBN (3 orang), fungsional Pustakawan (1 orang), Pranata Humas (1 orang), fungsional umum (6 orang) dan pejabat struktural (2 orang). Persentase pegawai non fungsional (fungsional lainnya) tersebut merupakan staf pelaksana di BRPSDI dan beberapa fungsional non kelas (Gambar 3).



Gambar 3. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Tahun 2024.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPSDM.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Triwulan I Tahun 2024 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.7 Potensi dan Permasalahan

1.7.1 Potensi

A. Organisasi

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dengan program riset pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) diharapkan mampu mengatasi masalah dan menjawab kendala mengenai degradasi sumber daya ikan yang ada secara efektif dan efisien, sehingga mampu memprediksi, mencegah, dan mengatasi berbagai permasalahan kerusakan sumber daya ikan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRPSDI didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik.

B. Sumber daya

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi yang merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yang dilaksanakan melalui kegiatan riset perikanan.

SDM pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai negeri sipil/PNS dan non ASN /tenaga kontrak. Pada tahun 2024, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan memiliki SDM BRPSDI mempunyai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 15 orang yang dibantu oleh pegawai dengan perjanjian kerja kontrak atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) sebanyak 22 orang (**Tabel 2**).

Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2024.

No	Staf BRPSDI	Pegawai Negeri Sipil	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Pustakawan	1	-	1
6	Fungsional Umum	6	0	6
7	Pramubakti	-	13	13
8	Pengemudi	-	3	3
9	Satpam	-	4	4
Jumlah		15	20	35

b. Sumber daya sarana-prasarana

Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan meliputi aset berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun pengembangan SDM diantaranya sarana laboratorium yang tersebar di unit kerja untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP. Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2024, diantaranya

- Laboratorium Pengujian BRPSDI yang terdiri atas Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Biologi Ikan, Laboratorium Plankton dan Larva, Laboratorium Bentuk dan Laboratorium Genetik.

- b. Gedung Kantor seluas: 1.058 m² dengan No. IMB: 503/IMB.410-DTRB/2004, tgl. 17 September 2004 yang terdapat di sekitar kawasan Waduk Ir. H. Djuanda;
- c. Luas Tanah 3.988 m² yang berlokasi di kawasan Munjul, Purwakarta yang dipergunakan untuk rumah dinas;
- d. Beberapa sarana dan prasarana lainnya seperti guest house, perpustakaan, peralatan laboratorium dan survei lapangan serta kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

1.7.2 Permasalahan

Permasalahan utama dalam bidang pemulihan sumber daya ikan adalah kompleksnya penyebab penurunan sumber daya ikan akibat tangkap lebih dan kerusakan atau penurunan kualitas habitat perairan akibat pencemaran atau dampak aktifitas antropogenik lainnya disamping penyebab alami seperti suksesi ekologi, perubahan iklim dan bencana alam. Pemulihan sumber daya ikan membutuhkan latar belakang data dan informasi serta model restocking dan rehabilitasi/restorasi yang relevan sehingga upaya pemulihan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien serta optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan menjadi penting dalam rangka mendukung salah satu misi KKP yaitu "Keberlanjutan" karena sumber daya ikan yang pulih artinya dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan mengingat sifatnya yang dapat diperbarui.

Upaya pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset di BRPSDI yang teridentifikasi antara lain:

1. Perubahan kelembagaan paska transformasi lembaga riset berdampak penurunan pemanfaatan sarana dan prasarana riset dan perubahan target kinerja pada tahun 2024.
2. Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber PNBK BRPSDI.
3. Terbatasnya informasi dan anggaran dalam pelibatan dan keikutsertaan pegawai pada pelatihan dan seminar menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja.
4. Penurunan jumlah SDM BRPSDI yang sangat signifikan paska transformasi lembaga riset.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber utama pangan, penyedia lapangan kerja dan pemberi manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga perikanan mempunyai arti penting sosial dan ekonomi yang sangat besar. Sampai saat ini, sebagian besar kebutuhan produk perikanan Indonesia masih dipenuhi dari kegiatan perikanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan perikanan yang dinamis dan meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan telah meningkatkan eksploitasi sumber daya secara intensif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari stok ikan dieksploitasi secara penuh, bahkan diusahakan secara berlebihan. Selain itu, masalah degradasi lingkungan semakin meningkatkan laju penurunan sumber daya hayati perikanan di kawasan perairan umum daratan dan pesisir laut. Dampak dari kondisi tersebut sumber daya ikan mengalami penurunan baik stok ikan maupun kualitas habitatnya sehingga memerlukan pemulihan.

Status sumber daya ikan yang rusak tersebut merupakan salah satu akibat dari kegagalan dalam pengaturan perikanan menuju tercapainya pengelolaan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemulihan sumber daya ikan yang mencakup pemacuan dan restocking sumber daya ikan (*fish stock enhancement*) dan rehabilitasi/restorasi habitat perairan akan sangat besar artinya bagi pemulihan sumber daya ikan serta pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Penyediaan data dan informasi serta teknologi mengenai pemulihan sumber daya ikan akan terpenuhi dan lebih terkoordinir jika ditangani oleh suatu lembaga riset yang mempunyai mandat untuk melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan institusi riset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dan mempunyai mandat melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut di tingkat nasional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga semua peneliti yang sebelumnya bekerja di BPPSDM akan diintegrasikan ke dalam BRIN. Hal ini mengakibatkan transformasi

kelembagaan, tugas, dan fungsi BPPSDM. Seluruh peneliti di BPPSDM harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan memindahkan diri ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berdampak pada transformasi kelembagaan Pusat dan UPT yang terkait dengan BPPSDM. Penyesuaian ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana Badan Riset Sumberdaya Manusia (BPPSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Meskipun demikian, hingga Triwulan IV, KKP masih dalam proses menyusun Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut. Sehingga, susunan organisasi dan tata kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020. Tetapi, belum dilakukan penyesuaian dan review Rencana Strategis BRPSDI.

2.1.1. Visi

Visi KKP adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis eselon III.b yang mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dalam menjalankan tugasnya, BRPSDI berpedoman pada visi sebagai berikut:

"Menjadi lembaga riset yang menyediakan IPTEK pemulihan sumber daya ikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan"

2.1.2. Misi

Misi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang riset kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mendukung 3 (tiga) misi yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat KP

2. Misi ke-4 yakni Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

2.1.3. Tujuan

"Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, hasil riset dan inovasi IPTEK pemulihan sumber daya ikan untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan nasional.."

Tujuan BRPSDI mencerminkan arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Litbangrap IPTEK) 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penjabaran Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
2. Menghasilkan dan mengembangkan riset perikanan dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai tugas dan fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, secara umum fungsi BRPSDI meliputi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- 2) Pelaksanaan penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 4) Pengelolaan sarana dan sarana penelitian, dan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan direncanakan dan diarahkan untuk menghasilkan informasi dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor perikanan khususnya subsektor perikanan tangkap yang tangguh baik di perairan tawar maupun laut. Berdasarkan mandat dan tupoksi, tujuan dan sasaran BRPSDI ditetapkan berdasarkan output kegiatan yang tertuang dalam kertas kerja RKA-K/L.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat

SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat

SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab

SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan

SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan

SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Pusriskan memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran program BPPSDM (SP-6) yang diturunkan dari sasaran strategis KKP (SS-8) yaitu :

SK-1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BRSDM KP yang pada unit eselon III disebut sebagai sasaran kegiatan adalah:

“SK.1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”

Seiring dengan dinamika kebijakan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama Tahun 2023, KKP khususnya BRSDM KP

mengalami perubahan. Perubahan kebijakan tersebut berkaitan dengan adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KepMenKP tersebut memuat beberapa konsep dasar yang bertujuan untuk menyederhanakan/merubah pola struktur organisasi lama (Koordinator/Sub Koordinator menjadi Tim Kelompok Kerja) sebagai bagian dari transformasi Reformasi Birokrasi.

KepMenKP tersebut juga merubah konsep dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terbagi menjadi dua karakteristik, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
2. Konsep pengklasifikasian Tingkat Validitas IKU disederhanakan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni Outcome, Output Kendali Rendah dan Output Kendali Tinggi;
3. Metode Cascading Indikator Kinerja (IK) disederhanakan menjadi 4 (empat) ruang lingkup, yakni Adopsi langsung, Komponen Pembentuk, Lingkup Dipersempit dan Buat Baru.

Perubahan konsep dan karakteristik tersebut mempengaruhi mekanisme perencanaan BRPSDI, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait dengan Kerangka Perencanaan, terutama menyesuaikan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (IK) sesuai dengan KepMenKP Nomor 43 Tahun 2023.

Tahun 2023, Sasaran Kegiatan BRPSDI "*Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan*" dihapus, karena SK tersebut menjabarkan kegiatan sesuai tugas dan fungsi (riset), sedangkan tuisi tersebut sudah dialihkan ke BRIN. Perubahan nomenklatur Sasaran Kegiatan (SK) dari "*Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan*" menjadi "*Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker*".

Selain perubahan Sasaran Kegiatan, terdapat perubahan pola pengelompokan indikator kinerja di lingkup BRSDM KP, khususnya BRPSDI. Jika pada Tahun 2022 seluruh indikator kinerja merupakan indikator kinerja utama (IKU), di Tahun 2024 indikator kinerja dikelompokkan berdasarkan tuisi atau *core business process* (IKU) dan kegiatan dukungan manajerial (IKK). Untuk satker eks riset lingkup BRSDM KP, sebagian besar tidak memiliki indikator kinerja utama (IKU), dikarenakan indikator kinerja yang berkaitan dengan tuisi sudah diblokir. Sehingga indikator kinerja yang melekat pada satker eks riset

hanya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun IKK yang dicascadingkan dari Pusat Riset Perikanan kepada BRPSDI Jatiluhur, antara lain:

1. Penambahan IKK baru yakni *“Nilai PNPB BRPSDI (Rupiah Miliar), Nilai PM SAKIP BRPSDI (Nilai), dan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)”*;
2. Penyesuaian Nomenklatur IKU *“Jejaring dan/atau kerjasama BRPSDI yang disepakati/ditindaklanjuti (Kesepakatan)”* menjadi IKK *“Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)”*;
3. Penghapusan IKK *“Bahan sintesa untuk rekomendasi potensi Pemulihan Sumber Daya Perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (kajian)”, dan “Karya tulis ilmiah riset BRPSDI yang dipublikasikan (dokumen)”*.

Sasaran Kegiatan (SK-1) yang akan dicapai adalah **“Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”**. Indikator Kinerja yang mendukung SK ini antara lain:

- I. IKK Nilai PNPB BRPSDI (Rupiah), memiliki target Tahunan 2.000.000 Rupiah;
- II. IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%), memiliki target Tahunan ≤ 0.5 ;
- III. IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target Tahunan 82,00;
- IV. IKK Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 78,50;
- V. IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 94,00;
- VI. IKK Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), memiliki target 94,00%;
- VII. IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%), memiliki target 82,00%;
- VIII. IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan 93,76;
- IX. IKK Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target tahunan 82,00;
- X. IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan), memiliki target tahunan 1,00 kemitraan;
- XI. IKK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%), memiliki target 100,00;

2.2 Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kegiatan, BRPSDI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.954.877.000,-. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2024 (DS: 2056-9910-7049-0280) yang setelah disahkan pada tanggal 24 November 2023. Anggaran BRPSDI dialokasikan untuk memenuhi 3 (tiga) Kerangka Output (KRO), yakni:

- Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp. 6.874.326.000,-;
- Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp. 12.811.000,-;
- Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp. 67.740.000,-.

2.3 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2024

Dalam mencapai sasaran, BRPSDI telah disusun suatu Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja tahunan terdiri atas indikator kinerja kegiatan dan rencana tingkat capaian (target), serta uraian output kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahunan BRPSDI didasarkan pada perjanjian kinerja BPPSDM KP secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNPB BRPSDI (Rupiah)	2.000.000
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%)	≤0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82
		4	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	78,5
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	94
		6	Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94

	7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)	82
	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	93,76
	9	Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (Nilai)	82
	10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)	1
	11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)	100

Perjanjian Kinerja BRPSDI tahun 2024 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala BRPSDI dengan Kepala Pusat Riset Perikanan. Perjanjian kinerja ini memuat Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target IKK. Dalam rangka mencapai target IKK tersebut, dialokasikan anggaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RKA-K/L BRPSDI tahun 2024. Pada awal tahun anggaran 2024 alokasi anggaran dalam DIPA BRPSDI adalah sebesar Rp. 6.954.877.000,- yang bersumber dari APBN rupiah murni. Setiap komponen dan sub komponen kegiatan dalam RKA-K/L disusun sesuai Rencana Kerja dan Bagan Akun Standar agar dapat mendukung pencapaian IKK yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2024.

2.4 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPSDI Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

Warna	Keterangan
Sangat Baik	110-120 + Ide Baru
Baik	90-120
Cukup	70 - <90
Kurang	50 - <70
Sangat Kurang	<=50

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BRPSDI dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada penyusunan Laporan Kinerja BRPSDI yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BRPSDI Nomor: 52/-BRPSDI/KU.110/I/2024 tentang tentang Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2024.

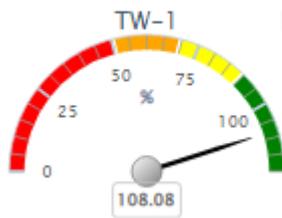
Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Balai selaku Penanggung Jawab, Sub Koordinator Tata Operasional sebagai Ketua, Sekretaris, Anggota dan Kontributor. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau langsung oleh Kepala Balai selaku Penanggung Jawab dan Sub Koordinator Tata Operasional sebagai Ketua Tim Laporan Kinerja, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala Pusat Riset Perikanan dengan tembusan kepada Sekretaris BPPSDMKP.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

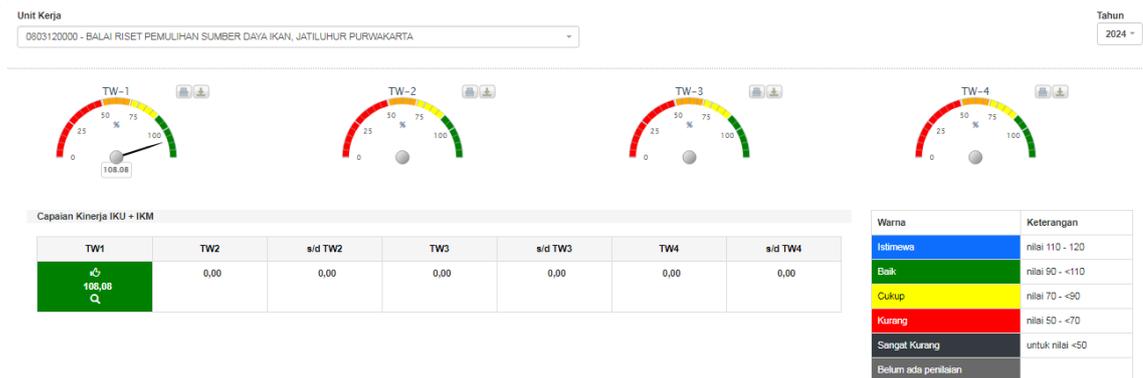
3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan kegiatan pada peta strategi yang dituangkan pada Perjanjian kinerja BRPSDI tahun 2024 dapat tercapai.

Evaluasi dan analisis kinerja yang dibahas dalam LKj BRPSDI Triwulan I Tahun 2024 dilakukan berdasarkan dokumen PK BRPSDI Tahun 2024. Pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK BRPSDI telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NKO. Nilai NKO ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).



Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI pada Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan dokumen PK Tahun 2024 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **108,08 %** yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKU



Gambar 4. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Tahun 2024 per tanggal 2 April 2024 Sumber: (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).

Secara umum, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan termasuk dalam kategori Baik. Dari sebelas IKK yang telah disetujui, terdapat empat IKK yang dapat diukur selama periode Triwulan I

Tahun 2024. Hasil validasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tiga IKK tersebut telah mencapai target periodik yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi.

Secara Umum, Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2024 yang telah diukur dapat dikategorikan baik. Nilai yang ditargetkan sudah terpenuhi, bahkan sebagian besar melebihi target. Penjabaran detail mengenai capaian IKK akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja.

3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPSDI. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPSDI yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

SK 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Pada sasaran kegiatan ini BRPSDI berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" melalui Sasaran Kegiatan "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker". Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker tersebut dilakukan dengan menghasilkan PNBPN, meminimalisir nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI, meningkatkan profesionalitas ASN BRPSDI, menerapkan sistem manajemen yang akuntabel, transparan, dan terukur sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja BRPSDI, menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BRPSDI khususnya dan lingkup KKP umumnya dengan berperan serta aktif menginformasikan kegiatan BRPSDI melalui aplikasi coolaboration office, menindaklanjuti masukan/rekomendasi hasil pengawasan tim APIP KKP, meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran BRPSDI, meningkatkan nilai

kinerja anggaran BRPSDI, melakukan kegiatan layanan Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut ada 11 (sebelas) IKK, yang dikelompokkan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun penjabaran IKK tersebut antara lain:

IKK.1 Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah)

IKK Nilai PNBP didefinisikan sebagai manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Adapun Objek/Ruang Lingkup PNBP diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Besaran target yang ditetapkan pada tahun 2024 yakni Rp. 2.000.000. IKK nilai PNBP termasuk dalam IKK yang memiliki komposisi validitas Output Kendali Rendah, sedangkan untuk periodisasi waktu pengukuran dari IKK ini ialah triwulanan. Data dukung/bukti capaian yang disepakati ialah data realisasi PNBP yang diperoleh melalui aplikasi OMSPAN dan Surat Penyampaian Capaian IKK PNBP dari Kepala BRPSDI kepada Kepala Pusrisikan. Berikut merupakan capaian IKK nilai PNBP BRPSDI sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 4. Capaian IKK 1 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024											
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker											
IKK-1. Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah)											
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024			
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	2.985.120	2.000.000	500.000	4.813.840	962%	61,26%	120%	2.000.000	120%	

Berdasarkan data pada **Tabel 5**. Nilai capaian IKK Nilai PNBP BRPSDI periode Triwulan I Tahun 2024 yakni sebesar **Rp. 4.813.840,-**. Nilai penerimaan PNBP BRPSDI yang diperoleh s.d 29 Maret 2024 bersumber dari Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi, dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung

dan Bangunan (iuran sewa rumah negara). Berikut merupakan rincian capaian PNPB BRPSDI per 29 Maret 2024:

Nama Satker	Target PNPB DIPA 2024	Capaian PNPB 2024			
		Januari	Februari	Maret	Total
BPPSDMKP	32.134.003.000	1.179.105.415	3.466.601.732	3.448.022.117	8.093.729.264
SATKER NON BLU	14.362.697.000	1.147.858.669	1.672.214.370	1.279.268.591	4.099.341.630
SUPM TEGAL	284.242.000	27.814.312	864.312	864.312	29.542.936
POLTEK KP BITUNG	427.260.000	35.765.644	47.217.144	25.682.394	108.665.182
BPPP MEDAN	380.000.000	23.844.087	37.160.000	26.335.308	87.339.395
BPPP AMBON	681.984.000	2.151.169	11.451.169	70.176.577	83.778.915
BPPP BANYUWANGI	770.875.000	6.546.085	451.915.450	83.245.450	541.706.985
BPPP BITUNG	188.600.000	94.573.158	26.084.548	6.140.748	126.798.454
AK KP WAKATOBI	15.677.000	350.000			350.000
LRSDKP	48.964.000	976.781			976.781
LPTK	3.344.000	1.170.431	142.494	332.486	1.645.411
PUSAT PENYULUHAN KP	-	1.617.568			1.617.568
BRPL	-	25.000	1.204.750		1.229.750
BRPPUPP	40.000.000	11.327.713	1.687.713	1.537.001	14.552.427
BRPSDI	2.000.000	1.071.280	71.280	3.671.280	4.813.840
LRPI	-		320.000	160.000	480.000
BBRBLPP	549.900.000	91.193.783	53.789.340	50.568.274	195.551.397
BRBAPPP	1.610.607.000	122.693.156	51.918.490	123.153.990	297.765.636
BRPBATPP	92.050.000	12.847.505	19.434.905	14.602.905	46.885.315
BRBIH	177.044.000	115.000	637.000	8.328.000	9.080.000
BRPI	408.420.000	57.411.370	95.753.770	87.951.535	241.116.675
LRBRL	14.050.000	2.786.811	36.811	10.721.811	13.545.433
BBRPPBKP	15.000.000		26		26
BBRSEKP	-	36.540.186	1.000.000	1.000.000	38.540.186
POLTEK KP KARAWANG	235.011.000	6.815.684	25.004.934	10.256.934	42.077.552
POLTEK KP KUPANG	109.774.000			1.134.165	1.134.165
POLTEK KP BONE	380.000.000	5.879.001	68.980.561	23.343.058	98.202.620
POLTEK KP DUMAI	104.000.000	839	18.900.000	10.435.400	29.336.239
POLTEK KP PANGANDARAN	365.968.000	1.061.991	13.851.265	1.135.289	16.048.545
POLTEK AUP JAKARTA	2.707.728.000	322.458.234	263.759.765	397.664.183	983.882.182
SUPM LADONG	105.364.000	1.604.505	4.504.508	1.604.505	7.713.518

Gambar 5. Realisasi Pendapatan BRPSDI triwulan I tahun 2024

Nilai capaian tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan PNPB pada periode Triwulan 1 tahun Tahun sebelumnya (2023) yakni **Rp. 2.985.120,-**. Sementara itu, jika dilihat persentase ketercapaian terhadap target tahun 2024 sebesar **120%**. Capaian PNPB tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan target 2024 pada renstra mengingat target ini merupakan IKK baru ditahun 2023 dan belum dilakukan review renstra untuk perubahan target capaian.

Faktor keberhasilan dalam peningkatan capaian PNPB selama triwulan I tahun 2024 diantaranya adalah adanya peningkatan permintaan jasa sewa alat survey BRPSDI dari beberapa lembaga diantaranya BRIN dan IPB. **Kegiatan pendukung** lain yang menunjang capaian PNPB yaitu kegiatan perawatan peralatan laboratorium dan survey yang menunjang kinerja peralatan untuk mendukung capaian PNPB..

Jika dibandingkan antara realisasi anggaran (16,35%) dengan capaian IKK Nilai PNPB (120%), BRPSDI telah berhasil mengupayakan efisiensi sebesar

103,65%. Efisiensi ini dicapai dengan memanfaatkan strategi pelibatan SDM BRPSDI eks-teknisi litkayasa sebagai tenaga pengoperasian pada kegiatan sewa alat untuk memperoleh penerimaan PNBPN dan juga dapat dipandang sebagai langkah dalam melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya pegawai BRPSDI.

Capaian PNBPN BRPSDI telah disampaikan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan melalui surat No. B.320/BRPSDI/RC.610/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal penyampaian capaian IKK Nilai PNBPN BRPSDI triwulan I tahun 2024 dan telah diumumkan melalui surat dinas BPPSDMKP No. B.3336 /BPPSDM.1/KU.340/IV/2024 tentang Capaian PNBPN Triwulan I Tahun 2024.

IKK 2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Unit Kerja merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 hari.

Tabel 5. Capaian IKK 2 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024											
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker											
IKK-2. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPSDI dibandingkan Realisasi Anggaran BRPSDI 2022 (%)											
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024			
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	-	≤0,5	-	-

Pengukuran IKK 2 ini dilakukan dengan cara membandingkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) BRPSDI sesuai yang ditetapkan Biro Keuangan, Setjen KKP dengan realisasi anggaran

BRPSDI. IKK LHP BPK pada triwulan I belum dapat diukur, dikarenakan IKK ini bersifat Tahunan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran dan verifikasi atas capaian kinerja pada periode triwulan I Tahun 2024.

IKK 3. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai capaian indeks profesionalitas ASN diperoleh dari jumlah nilai kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN. Nilai kesesuaian kualifikasi pendidikan dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar pada pegawai. Nilai kompetensi dapat ditingkatkan dengan mengirimkan pegawai pada diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat teknis dan fungsional untuk fungsional umum dan pejabat fungsional, serta seminar untuk pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan nilai kedisiplinan ditentukan berdasar ada tidaknya hukuman disiplin yang dikenakan pada pegawai.

Tabel 6. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKK-3. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)										
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	82	-	-	-	-	-	82	-

Pengukuran IKK Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi ropeg KKP (<http://ropeg.kkp.go.id/>). IKK ini belum

dapat diukur, dikarenakan IKK ini bersifat Semesteran sehingga belum dapat dilakukan pengukuran dan verifikasi atas capaian kinerja pada periode triwulan I Tahun 2024.

IKK 4. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2022 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Tabel 7. Capaian IKK 4 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKK-4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)										
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	78,5	-	-	-	-	-	78,5	-

IKK Nilai PM SAKIP BRPSDI belum dapat diukur pada periode Triwulan I, dikarenakan IKK ini bersifat Tahunan. Namun umumnya penilaian mandiri/uji petik implementasi SAKIP baik yang dilakukan secara mandiri oleh tim SAKIP internal satker ataupun Inspektorat Jenderal KKP dilakukan pada periode triwulan III.

IKK 5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)

IKK ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja terbagi menjadi 3 (tiga) aspek penilaian, yakni:

1. Aspek Kepatuhan, dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW IV;
2. Aspek Kesesuaian, dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data;
3. Aspek Ketercapaian, dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW IV Tahun 2022 pada aplikasi kinerjaku.

IKK Rekonsiliasi kinerja merupakan IKK yang dicascadingkan langsung oleh Pusat Riset Perikanan dan bersifat Tahunan. Bukti dukung capaian IKK ini adalah Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala Balai.

Tabel 8. Capaian IKK 5 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKK-5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)										
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	94	-	-	-	-	-	94	-

IKK Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI belum dapat diukur pada periode triwulan I, dikarenakan IKK ini bersifat Tahunan. Namun umumnya penilaian Rekonsiliasi Kinerja dilakukan pada awal triwulan IV dan difasilitasi oleh BPPSDMKP. Verifikasi dan validasi hasil penilaian internal di asistensi oleh tim verifikator dari BPPSDMKP.

IKK 6. Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Merujuk pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), KKP telah menetapkan salah satu indikator kinerja utamanya yaitu “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)”, dimana target pada tahun 2023 sebesar 92%. Sesuai dengan definisi pada manual indikator kinerja utama tingkat KKP, Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

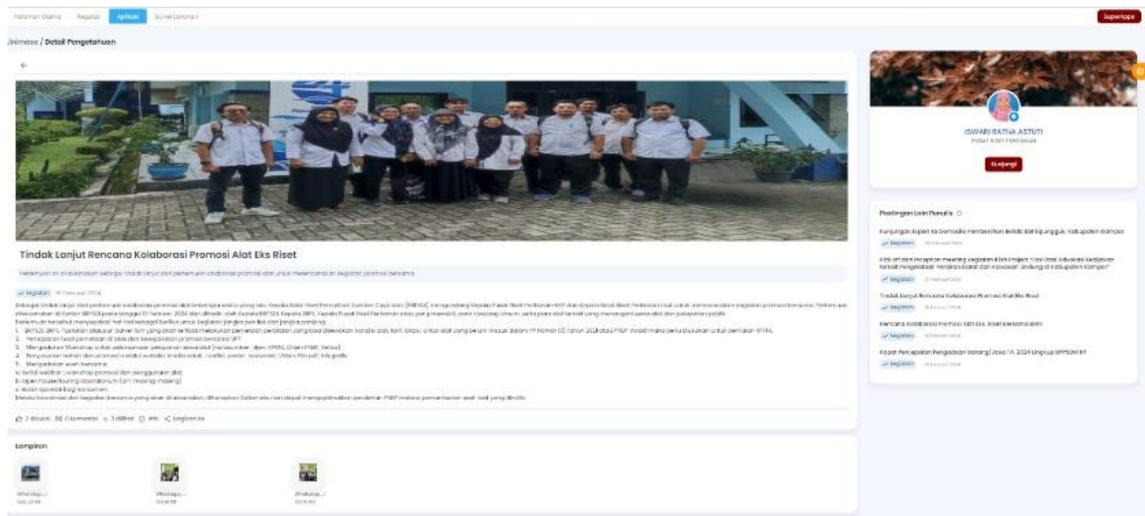
Salah satu perangkat berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai implementasi dalam pengukuran indikator kinerja ini yaitu aplikasi *Collaboration office* (Coofis). Aplikasi Coofis merupakan media sistem informasi yang digunakan dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan alamat *website* <https://portal.kkp.go.id>. Pada aplikasi ini, Kepala BRPSDI mengunggah aktivitas UPT dalam bentuk informasi, kegiatan, dan video/jurnal dengan komponen yang dinilai adalah keaktifan dengan melihat pada jumlah dan jenis informasi yang diunggah.

Dalam jangka panjang, jika telah dilakukan integrasi terhadap sistem informasi yang digunakan dalam proses kerja dalam organisasi, fasilitas ini bisa berkembang untuk mendeteksi pemanfaatan pengetahuan yang ada dalam pengambilan keputusan di segenap lingkungan KKP yang dapat diakses melalui alamat <https://portal.kkp.go.id>.

Tabel 9. Capaian IKK 6 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKK-6. Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)										
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
84,44	100	92 (109%)	94	94	100	106.38	6,38	106.38	94	6,38

Nilai Presentase Manajemen Pengetahuan Terstandar diperoleh berdasarkan dengan jumlah dan jenis informasi kegiatan (informasi, kegiatan, dan video/jurnal) yang diupload pada Aplikasi *Collaboration Office* (Coofis) pada alamat <https://portal.kkp.go.id>. Pada periode Triwulan 1 Tahun 2024 BRPSDI sudah melakukan upload 6 informasi berita kegiatan.



Gambar 6. Upload informasi dalam format kegiatan di aplikasi coofis.

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2024 diambil dari Surat Dinas Pusat Riset Perikanan perihal Perubahan Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Triwulan I Tahun 2024 Nomor. 587/BRSDM.3/RC.610/IV/2024

tanggal 2 April 2024 dimana pada surat tersebut memperoleh capaian prosentase Manajemen Pengetahuan Terstandar sebesar **100%**.

No	Nama Satker	Nilai Akhir Tahun
1	BRPPUPP Palembang	133.33%
2	BRPBAPPP Maros	133.33%
3	BRBPATPP Bogor	133.33%
4	BBRBLPP Gondol	133.33%
5	BRBIH Depok	133.33%
6	BRPL Jakarta	133.33%
7	BRPSDI Jatiluhur	100.00%
8	BRPI Sukamandi	133.33%
9	LRPT Denpasar	133.33%
10	LRBRL Gorontalo	133.33%
11	LRMPHP Bantul	133.33%

Gambar 7. Capaian IKK 6 pada satker lingkup Pusrisikan.

Nilai Capaian IKK Persentase unit kerja BRPSDI yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) periode triwulan I tahun 2024 adalah **100%**. Nilai capaian ini merupakan capaian nilai tertinggi dibandingkan capaian triwulan I tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 capaian nilai IKK ini 84,4% dan meningkat pada tahun 2022 dengan nilai 100% serta 92% pada tahun 2023. Tingkat ketercapaian IKU terhadap target Tahun 2024 mencapai 106,38%, begitupun dengan tingkat ketercapaian IKU terhadap target Renstra 2020-2024, yakni 106,38%.

Capaian IKK 6 berhasil diperoleh dengan penggunaan anggaran 8,77% dan capaian kegiatan 106,38%. Dengan demikian berhasil dilakukan efisiensi sebanyak 97,61%. Selain terlaksananya efisiensi penggunaan anggaran tersebut, efisiensi penggunaan sumberdaya berupa pegawai dan prasarana penunjang yang tersedia juga berhasil dilaksanakan melalui pelibatan pegawai dengan ketrampilan desain grafis dan akses internet yang telah tersedia dalam penyusunan naskah pemberitaan.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah adanya komitmen BRPSDI dalam melakukan update berita/informasi dalam format yang didukung dalam aplikasi coofis yang mudah diakses serta komitmen pimpinan dalam mengawal pencapaian IKK tersebut dengan melakukan monitoring, pengawasan serta pengendalian rutin setiap bulan. Selain itu, capaian IKK 6 juga didukung adanya **kegiatan pendukung**

diantaranya kegiatan pembuatan vlog untuk keperluan publikasi serta kegiatan kehumasan yang dapat mendorong publikasi kegiatan BRPSDI serta monitoring rutin terhadap keaktifan pejabat dalam penginputan/*sharing* informasi/berita pada laman <https://portal.kkp.go.id>.

IKK 7. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDM KP. IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dikategorikan sebagai IKK yang memiliki tingkat validitas output kendali tinggi. Periode sasi pengukuran IKK ini dilakukan setiap triwulan.

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2024 diambil dari Surat Dinas Sekretariat BPPSDM perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPSDM KP" No. B.292/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 14 Januari 2024.

Tabel 10. Capaian IKK 7. BRPSDI Tahun 2024.

2024											
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker											
IKK-7. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)											
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024			
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	75 (100%)	82	82	82	100	-	-	82	-	

Berdasarkan data pada Tabel diatas. Diketahui bahwa nilai capaian IKK ini ialah 80%. Nilai tersebut merupakan representasi atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh tim secara tuntas. Nilai Capaian IKK tidak dapat dibandingkan dengan periode Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut, IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen

tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) tidak diturunkan sampai ke level UPT. Tingkat ketercapaian IKU terhadap target triwulan I Tahun 2024 mencapai 100% dikarenakan BRPSDI tidak termasuk satker yang melaksanakan uji petik pengawasan Itjen. Capaian ini berhasil diperoleh dengan penggunaan anggaran 23.75% dan capaian kegiatan 100%, dengan demikian berhasil dilakukan efisiensi sebanyak 76,25%.

Faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian indikator ini ialah komitmen BRPSDI dalam melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran yang mengacu pada asas kepatuhan, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas dan kewajaran serta adanya dukungan SDM yang profesional dan kompeten. Namun demikian dengan rendahnya capaian dibanding target triwulan I tahun 2024 maka diperlukan rasionalisasi perencanaan target. Selain itu, capaian IKK 7 ini tidak lepas dari adanya **kegiatan pendukung** berupa kegiatan pemantauan dari Kepala BRPSDI yang selalu menekankan penyelesaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan tertib administrasi, serta mengikuti kaidah dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pemantauan terhadap progres tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dari Itjen/eksternal juga dilakukan. Selain itu, BRPSDI juga mendorong setiap SDM di lingkup BRPSDI untuk mengikuti pengembangan kapasitas maupun kemampuan teknis di masing-masing bidang/fungsional yang telah dipilih secara rutin.

IKK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

IKK ini ditetapkan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BRPSDI yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini

dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen).

Tabel 11. Capaian IKK 8. BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024											
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker											
IKK-8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)											
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024			
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	-	93,76	-	-	-	-	-	93,76	-	

IKK Nilai IKPA BRPSDI belum dapat diukur pada periode triwulan I, dikarenakan IKK ini bersifat Semesteran. Penilaian IKK ini menggunakan instrumen dari Kementerian Keuangan, yaitu aplikasi OMSPAN (Online Monitoring – Sistem Perbendaharaan dan Administrasi Negara) pada website (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Hasil penilaian IKK tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan melalui Nota Dinas Sekjen KKP.

IKK 9. Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)

IKK ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran. IKK ini bertujuan untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

Tabel 12. Capaian IKK 9. BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024											
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker											
IKK-9. Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (nilai)											
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024			
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	-	82	-	-	-	-	-	82	-	

IKK Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI belum dapat diukur pada periode Triwulan I, dikarenakan IKM ini bersifat Tahunan. Penilaian IKK ini dilakukan

dengan menggunakan instrumen eksternal yakni aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan (SMART DJA) (<http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/>). Hasil penilaian IKK tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan melalui Nota Dinas Sekjen KKP.

IKK 10. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)

IKK ini didefinisikan sebagai Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPSDI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPSDI mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP, PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN, dan Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

Cara pengukuran capaian IKK ini dapat dinilai berdasarkan Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. IKK ini memiliki periodisasi waktu pengukuran Tahunan, namun dapat tercapai sebelum Tahun anggaran berakhir. Akan tetapi pada periode tahun ini, BRPSDI belum menjalin kemitraan baru dengan pihak eksternal KKP. Nilai capaian IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan) tersaji pada tabel 23.

Tabel 13. Capaian IKK 10 BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKK-10. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)										
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-



Gambar 8. *Screenshot* perjanjian kerjasama dengan UNTAG Cirebon sebagai kerjasama kemitraan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024.

BRPSDI pada tahun 2023 berhasil menjalin kemitraan sebanyak 2 kesepakatan kemitraan. Pada tahun 2024 ini, satu kegiatan kemitraan dilanjutkan dan tetap ditindaklanjuti sebagai capaian IKK 10 pada tahun 2024.

IKK 11. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai 'Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

IKK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) bersifat Triwulanan, dengan tingkat validasi IKU output kendali tinggi. Bukti dukung capaian IKK ini adalah Dokumen layanan dukungan manajemen internal satker yang tersedia dari kegiatan penyusunan

kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang mendapatkan pengesahan dari Koordinator/Sub Koordinator dan ditandatangani pimpinan satker.

Berdasarkan Tabel 25. IKK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) Tahun 2024 sebesar 100%. Nilai capaian tersebut sama dengan tahun 2022 dan 2023 dimana BRPSDI juga mencapai nilai 100 pada triwulan yang sama. Nilai Capaian tersebut merupakan representasi dari kegiatan yang sudah terlaksana dan telah menghasilkan output berupa laporan kegiatan. Laporan tersebut diantaranya laporan mingguan, laporan bulanan, laporan SPIP, laporan layanan keuangan, dan laporan kinerja. Berikut merupakan rincian dokumen manajerial/stratgeis lainnya yang sudah tercapai selama Tahun 2024.

Tabel 14. Capaian IKU 11. BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

2024										
Sasaran Kegiatan 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker										
IKK-11. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)										
Realisasi TW I 2021-2023			2024					Renstra BRPSDI 2020 – 2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TWI	% Capaian Terhadap Target TW I 2024	% Kenaikan TW I 2023-2024	%Capaian Terhadap Target 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100

Faktor pendukung tercapainya IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI ini diantaranya adalah Komitmen terlaksananya seluruh kegiatan manajerial berupa laporan interim yang didukung oleh ketersediaan peralatan perkantoran yang dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan. Selain itu, **kegiatan pendukung** keberhasilan dalam memperoleh capaian IKK 11 pada tahun 2024 diantaranya adanya kegiatan-kegiatan pertemuan dalam rangka persiapan, pemantauan dan tindak lanjut terkait pelaporan. Efisiensi pelaksanaan IKK 11 ini sebesar 80,77% dari perbandingan antara penyerapan anggaran sebesar 19,23% dan capaian kegiatan 100%.

Tabel 15. Hasil Perhitungan Capaian IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI Triwulan I Tahun 2024

NO	LAPORAN	B01		B02		B03		S.D TW I		PRESENTASE
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Laporan SPIP	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
2	Laporan Kinerja	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
3	Laporan Layanan Keuangan	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
4	Laporan Bulanan	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
5	Laporan Mingguan	5	5	4	4	4	4	13	13	100%
TOTAL LAPORAN LAYANAN DUKMAN										100%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2024 (DS: 2056-9910-7049-0280) yang setelah disahkan pada tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp 6.954.877.000,-. Sampai dengan periode triwulan I Tahun 2024, BRPSDI telah melakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal. Berikut merupakan kronologis revisi DIPA yang telah dilakukan BRPSDI selama periode tahun 2024, yaitu:

1. Revisi I DIPA, berkaitan dengan pergeseran antar-RO dan/atau dalam RO yang sama dalam KRO yang sama dan perubahan rencana penarikan dana dan/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Pertimbangan untuk mempercepat capaian kinerja satuan kerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi I Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2024 (DS: 9020-6543-0043-3224) Tahun Anggaran 2023 yang telah disahkan pada tanggal 19 Januari 2024 dengan jumlah anggaran BRPSDI adalah Rp. 6.954.877.000,-.
2. Revisi II DIPA, berkaitan dengan blokir anggaran Automatic Adjustment (AA) Pusat Riset Perikanan Tahun Anggaran 2024. Eksersise sumber blokir AA untuk lingkup BRPSDI sebesar Rp 143.000.000,- dari Dukungan Manajemen. Sumber AA diambil dari dana Rupiah Murni (RM) tanpa mengurangi volume output, dan bukan dari belanja 001 dan 002. Dasar dari Automatic Adjustment (AA) adalah Nota Dinas Sekretaris Jenderal KKP nomor 31/SJ.1/RC.420/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Usulan Automatic Adjusmen (AA) Belanja KKP TA 2024 dan Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan nomor B.373/BPPSDM.1/RC.420/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Penyampaian Blokir Anggaran Automatic Adjustment (AA) BPPSDMKP TA 2024. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi II Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 032.12.2.403824/2024 (DS: 4808-8810-7168-3413) Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan pada tanggal 29 Januari 2024 dengan jumlah anggaran BRPSDI tetap yaitu sebesar Rp. 6.954.877.000,-.

3. Revisi III DIPA, berkaitan dengan pergeseran antar-RO dan/atau dalam RO yang sama dalam KRO yang sama dan perubahan rencana penarikan dana dan/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Pertimbangan untuk mempercepat capaian kinerja satuan kerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi III Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2024 (DS: 4808-8810-7168-3413) Tahun Anggaran 2023 yang telah disahkan pada tanggal 07 Februari 2024 dengan jumlah anggaran BRPSDI adalah Rp. 6.954.877.000,-.

Total anggaran BRPSDI tahun 2024 terdiri dari dua jenis belanja anggaran yakni, belanja pegawai (51) sebesar **Rp. 2.936.977.000,-**. dan belanja barang (52) sebesar **Rp. 4.017.900.000,-**. Jumlah realisasi keuangan BRPSDI berdasarkan aplikasi OMSPAN/SAKTI per tanggal 29 Maret 2024 ialah **19,21 %** atau **Rp. 1.335.688.922,-** yang terbagi ke dalam dua jenis belanja anggaran, yakni belanja pegawai (51) **Rp. 638.281.874,-** atau **21,73 %** dan belanja barang (52) **Rp. 697.407.048,-** atau **17,36%**.

Tabel 16. Realisasi anggaran BRPSDI berdasarkan jenis belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2024 per tanggal 29 Maret 2024 pada aplikasi SAKTI.

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	2,936,977,000	638,281,874	21.73%
2.	Belanja Barang	4,017,900,000	697,407,048	17.36%
3.	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Total Anggaran :		6,954,877,000	1,335,688,922	19.21%

Realisasi Anggaran BRPSDI Per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6,954,877,000	1,335,688,922	19.21%
Jumlah Total Anggaran :		6,954,877,000	1,335,688,922	19.21%

Tabel 30. Realisasi Anggaran BRPSDI per IKK Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Efisiensi (%)
1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1 Nilai PNBP BRPSDI (Rupiah)	2.000.00	4.813.840	120,00%	Layanan BMN: Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Riset Perikanan	6.116.000	1.000.000	16,35	103,65
	2 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%)	≤0,5			Layanan Manajemen Keuangan: Pelayanan Keuangan Riset Perikanan	10.809.000	3.009.039	27,84	
	3 Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82			Layanan Manajemen SDM: Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan	12.811.000	4.963.500	38,74	
	4 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	78.5			Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan (Pelaksanaan Monev Kegiatan dan Anggaran)	10.010.000	960.000	9,59	
	5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	94			Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset Perikanan	8.500.000	1.000.000	11,76	
	6 Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	100	106,38%	Layanan Data dan Informasi: Pelayanan Data Riset Perikanan (Pengelolaan Data Informasi Riset Perikanan)	11.400.000	1.000.000	8,77	97,61



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Efisiensi (%)	
	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	82	82	100,00%	Layanan Umum: Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtangaan Riset Perikanan (Implementasi Sistem Pengawasan Intern Instansi Pemerintah)	4.210.000	1.000.000	23,75	76,25
	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	93,76			Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan (Penyusunan Rencana dan Revisi Anggaran)	22.461.000	3.000.000	13,36	
	9	Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (Nilai)	82			Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Perikanan (Penyusunan dan Pemantapan Rencana Program Kegiatan Riset dan Manajerial)	15.960.000	3.375.000	21,15	
	10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)	1			Layanan Hubungan Masyarakat: Pelayanan Kerjasama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pengembangan dan Pengelolaan Kerjasama Dalam dan/atau Luar Negeri)	12.220.000	1.000.000	8,18	



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Efisiensi (%)
	11 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00%	1. Layanan Umum: Pelayanan Teknis dan jasa riset Perikanan 2. Layanan Hubungan Masyarakat: Pelayanan Kehumasan Riset Perikanan dan Pelayanan Perpustakaan dan Diseminasi Riset Perikanan 3. Layanan Umum: Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan (Penyelenggaraan Administrasi Rumah Tangga, Operasional pimpinan dan staff satuan kerja) 4. Layanan Perkantoran: Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.840.380.000	1,315,381,383	19,23	80,77
TOTAL				108,08%		6.954.877.000	1.335.688.922	19,21%	89,57%

3.4 Efisiensi Sumber Daya

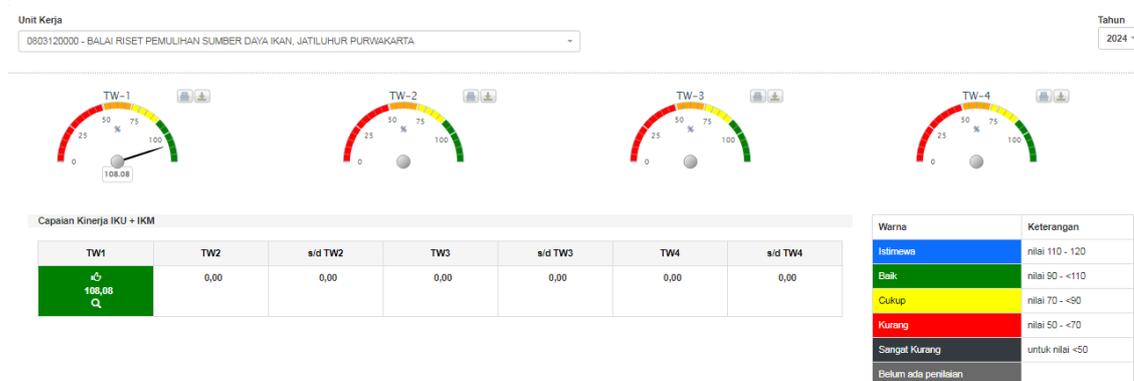
Pelaksanaan kegiatan BRPSDI tahun 2024 dilakukan seefisien mungkin dengan memperhatikan efisiensi baik dalam penggunaan anggaran, sumberdaya manusia, dan aset. Pada triwulan I tahun 2024, dari 11 Indikator kinerja yang berhasil dicapai sesuai target berhasil diperoleh **efisiensi anggaran** sebesar 89,57% yang diperoleh dari presentase capaian kinerja 108,08% dan realisasi anggaran sebesar 19,21%. Secara rinci efisiensi anggaran dalam pencapaian per indikator kinerja telah disajikan dalam narasi sub pembahasan Evaluasi dan Analisa Kinerja. Capaian efisiensi anggaran ini dberhasil dicapai melalui perencanaan kinerja yang baik, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan sumberdaya secara optimal. Oleh karena itu, dalam mendukung tercapainya efisiensi anggaran, BRPSDI juga melakukan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan aset yang tersedia.

Sebagai satker eks-riset yang masih dalam proses transformasi kelembagaan, BRPSDI sudah tidak lagi diperkenankan melaksanakan fungsi riset. Namun demikian, BRPSDI dengan sumberdaya manusia terampil dibidang riset dan didukung oleh peralatan laboratorium dan survey yang tersedia, perlu untuk melakukan optimalisasi sumberdaya tersebut. **Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia** dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia eks-teknisi litkayasa untuk berperan aktif sebagai operator alat survey dan alat laboratorium untuk dapat meningkatkan capaian kinerja BRPSDI. Dengan demikian, beberapa indikator kinerja dapat secara efisien tercapai terutama untuk indikator kinerja nilai PNBP dan kemitraan. Selain itu, dengan adanya pengoperasian peralatan eks-riset yang tersedia, maka **Efisiensi aset** juga dapat dicapai baik melalui mekanisme sewa alat laboratorium, alat survey, dan *guesthouse* untuk mendukung capaian nilai PNBP maupun melalui mekanisme kemitraan. Selain itu, dengan tersedianya infrastruktur perkantoran seperti ruangan aula pertemuan, BRPSDI dapat memanfaatkan secara efisien melalui pemanfaatan ruang dalam fasilitasi kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh lingkup BPPSDMKP.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tugas dan fungsi BRPSDI dalam mendukung tercapainya IK Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) ataupun BPPSDMKP dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Beberapa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan aplikasi eksternal (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja) atau Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>). Berdasarkan hasil pengukuran Kinerjaku, capaian kinerja BRPSDI menunjukkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar **108,08%** dengan status Baik (warna hijau).



Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 11 IKK yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periode 2024 yakni 11 (sebelas) IKK. Hasil validasi yang telah dilakukan, keempat IKK tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKK tersebut, antara lain:

- I. IKM Nilai PNBPN BRPSDI (Rupiah), memiliki target tahunan yakni 2.000.000 Rupiah, target di periode triwulan I yakni 500.000 Rupiah. Nilai capaian PNBPN per triwulan I yakni 4.813.840 Rupiah;
- II. IKM Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), memiliki target tahunan yakni 94%, target di periode triwulan I yakni 94%. Nilai capaian per triwulan I yakni 100%;
- III. IKM Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 82%, target di periode triwulan I yakni 82%. Nilai capaian per triwulan I yakni 82%;

- IV. IKM Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%), memiliki target tahunan yakni 100%, target di periode triwulan I yakni 100%. Nilai capaian per triwulan I yakni 100%;

4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut

Pelaksanaan kegiatan BRPSDI dalam memenuhi atau mencapai target tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala maupun masalah baik teknis maupun non teknis. Secara umum kendala-kendala tersebut sudah berhasil diatasi. Berikut merupakan permasalahan yang muncul selama Triwulan I Tahun 2024:

Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
Perubahan kelembagaan paska transformasi lembaga riset berdampak penurunan pemanfaatan sarana dan prasarana riset dan perubahan target kinerja pada tahun 2024.	Berkoordinasi dengan Pusris dan BPPSDMKP terkait kelembagaan dan melakukan review renstra	Masih menunggu informasi lebih lanjut penerbitan SOTK baru	Kelembagaan BRPSDI masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020. Belum dilakukan review renstra untuk mempertimbangan capaian dan perubahan target kinerja 2024
Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber PNBP BRPSDI.	Melakukan koordinasi dengan Pusat Riset Perikanan dan KPKNL untuk mencari alternatif skema penerimaan PNBP melalui jenis layanan publik lain	Penggunaan sarpras riset telah berhasil dilaksanakan melalui mekanisme sewa atau kemitraan sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan aset yang tersedia.	Pelayanan publik dapat kembali dilakukan dengan memanfaatkan jasa layanan yang masih diijinkan

4.3 Saran

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPSDI. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPSDI.



LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Tugas Pengelola Kinerja BRPSDI 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
TELEPON (0264) 8307285, FAKSIMILE (0264) 8307285
LAMARAN: <https://kkp.go.id/brsdm/brpsdi/jatiluhur>, POS ELEKTRONIK: brpsdi@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
B.52/BRPSDI/KU.110/I/2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2024;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1589);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

DIPERINTAHKAN :

- Kepada : NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI
- Untuk : 1. Di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelolaan Kinerja

pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada Tahun Anggaran 2024

2. Masa Kerja Tim Pengelolaan Kinerja pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terhitung sejak berlakunya Keputusan Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran Surat
Nomor : B.52/BRPSDI/KU.110/I/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
TAHUN 2024

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Umum Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	Sekretaris
3	Riswanto, S.Kel., M.Si Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Penanggung Jawab
4	Indriatmoko, S.Kel., M.Si Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
5	Dimas Angga Hediarto, S.Pi., M.Si Analis Kerjasama	Anggota
6	Aulia Nurmaulidia A.P.P., S.T Pelaksana Tata Operasional	Anggota

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Disandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran II. Dokumen PK BRPSDI Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKS/MILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iswari Ratna Astuti

Jabatan : Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Yayan Hikmayani

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan


Iswari Ratna Astuti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1.	Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	2.000.000
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%)	≤0,5
		3.	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82
		4.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	78,5
		5.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)	94
		6.	Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	82
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	93,76
		9.	Nilai Kinerja Anggaran BRPSDI (Nilai)	82
		10.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Diindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1
		11.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.954.877.000
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2024		6.954.877.000

Jakarta, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Nikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan


Iswari Ratna Astuti

Lampiran III. Surat Capaian PNPB Triwulan I Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id

Nomor : B.3336 /BPPSDM.1/KU.340/IV/2024 17 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian PNPB Triwulan I Tahun 2024

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

Bersama ini terlampir kami sampaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja di lingkungan BPPSDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2024. Data capaian sebagaimana dimaksud berdasarkan data pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan dipergunakan sebagai bukti capaian kinerja PNPB Triwulan I Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala BPPSDM
Plt. Sekretaris BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

Tembusan:
Kepala BPPSDM.

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : B.1451 /BPPSDM.1/TU.340/IV/2024
Tanggal : 17 April 2024

CAPAIAN PNBP SATKER BPPSDM
TRIWULAN I TAHUN 2024

Nama Satker	Target PNBP DIPA 2024	Capaian PNBP 2024			
		Januari	Februari	Maret	Total
BPPSDMKP	32.134.000.000	1.179.105.415	3.466.601.732	3.448.022.117	8.093.729.264
SATKER NON BLU	14.362.697.000	1.147.858.669	1.672.214.370	1.279.268.591	4.099.341.630
SUPM TEGAL	284.242.000	27.814.312	864.312	864.312	29.542.936
POLTEK KP BITUNG	427.260.000	35.765.644	47.217.144	25.682.394	108.665.182
BPPP MEDAN	380.000.000	23.844.087	37.160.000	26.335.308	87.339.395
BPPP AMBON	681.984.000	2.151.169	11.451.169	70.176.577	83.778.915
BPPP BANYUWANGI	770.875.000	6.546.085	451.915.450	83.245.450	541.706.985
BPPP BITUNG	188.600.000	94.573.158	26.084.548	6.140.748	126.798.454
AK KP WAKATOBI	15.677.000	350.000			350.000
LRSDKP	48.964.000	976.781			976.781
LPTK	3.344.000	1.170.431	142.494	332.486	1.645.411
PUSAT PENYULUHAN KP	-	1.617.568			1.617.568
BRPL	-	25.000	1.204.750		1.229.750
BRPPUPP	40.000.000	11.327.713	1.687.713	1.537.001	14.552.427
BRPSDI	2.000.000	1.071.280	71.280	3.671.280	4.813.840
LRPT	-		320.000	160.000	480.000
BBRBLPP	549.900.000	91.193.783	53.789.340	50.568.274	195.551.397
BRBAPPP	1.610.607.000	122.693.156	51.918.490	123.153.990	297.765.636
BRPBATPP	92.050.000	12.847.505	19.434.905	14.602.905	46.885.315
BRBIH	177.044.000	115.000	637.000	8.328.000	9.080.000
BRPI	408.420.000	57.411.370	95.753.770	87.951.535	241.116.675
LRBRL	14.050.000	2.786.811	36.811	10.721.811	13.545.433
BBRPPBKP	15.000.000		26		26
BBRSEKP	-	36.540.186	1.000.000	1.000.000	38.540.186
POLTEK KP KARAWANG	235.011.000	6.815.684	25.004.934	10.256.934	42.077.552
POLTEK KP KUPANG	109.774.000			1.134.165	1.134.165
POLTEK KP BONE	380.000.000	5.879.001	68.980.561	23.343.058	98.202.620
POLTEK KP DUMAI	104.000.000	839	18.900.000	10.435.400	29.336.239
POLTEK KP PANGANDARAN	365.968.000	1.061.991	13.851.265	1.135.289	16.048.545
POLTEK AUP JAKARTA	2.707.728.000	322.458.234	263.759.765	397.664.183	983.882.182
SUPM LADONG	105.364.000	1.604.505	4.504.508	1.604.505	7.713.518
SUPM PARIAMAN	1.278.819.000	27.154.755	41.680.727	806.782	69.642.264
SUPM PONTIANAK	265.858.000	3.050.182			3.050.182
SUPM WAEHERU	475.000.000	6.691.703	63.577.571	63.370.823	133.640.097
SUPM SORONG	264.989.000	10.660.000	189.970.000		200.630.000
POLTEK KP JEMBARANA	430.672.000	170.595.000		164.170.150	334.765.150
SEKRETARIAT BPPSDMKP	-	1.876.245	20.122.052	7.634.141	29.632.438
POLTEK KP SORONG	364.680.000	55.431.840	29.112.535	10.749.840	95.294.215
SUPM KOTA AGUNG	700.817.000	2.096.101	130.399.700	1.149.700	133.645.501
BDA SUKAMANDI	864.000.000	1.661.550	1.661.550	71.341.550	74.664.650
SATKER BLU	17.771.306.000	31.246.746	1.794.387.362	2.168.753.526	3.994.387.634
POLTEK KP SIDOARJO	7.241.100.000	29.807.070	777.439.198	220.722.998	1.027.969.266
BPPP TEGAL	10.530.206.000	1.439.676	1.016.948.164	1.948.030.528	2.966.418.368

Lampiran IV. Surat Penilaian IKU MP Triwulan I Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMARAN www.kkp.go.id

Nomor : 587/BRSDM.3/RC.610/IV/2024 2 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penilaian IKU Manajemen Pengetahuan Triwulan 1 Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka evaluasi dan penilaian IKU Manajemen Pengetahuan (MP) lingkup Pusat Riset Perikanan Triwulan 1 Tahun 2024 menggunakan platform portal Collaboration Office (<https://portal.kkp.go.id>), dengan ini kami sampaikan Nilai Capaian IKU Manajemen Pengetahuan (IKU MP) satker lingkup Pusat Riset Perikanan Triwulan 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai Akhir Tahun
1	HRPPI/PP Palembang	133.33%
2	HRPHAPP Maros	133.33%
3	DRDPATPP Bogor	133.33%
4	DBRBLPP Gondol	133.33%
5	DRBIII Depok	133.33%
6	HRPI Jakarta	133.33%
7	BRPSDI Jatiluhur	100.00%
8	BRPI Sukamandi	133.33%
9	LRPT Denpasar	133.33%
10	LRBRL Gorontalo	133.33%
11	LRMPHP Bantul	133.33%

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala BRSDM
Balai Pusat Riset Perikanan,

Yayuh Hikmayani

Tembusan:

1. Kepala BRSDM
2. Sekretaris BRSDM

Lampiran V. Surat Penilaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JEP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bsdm@kkp.go.id

Nomor : B.292/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 14 Januari 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPSDM KP" Triwulan IV Tahun 2023

Yth. (daftar nama terlampir)

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 103/ITJ.O/TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Ijen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 31 Maret 2023 (Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan I Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 (triwulan IV Tahun 2023);
2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan IV Tahun 2023 lingkup BPPSDM KP sebesar 86,26% (tuntas 339 dari 393 rekomendasi);
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Ijen disampaikan pada lampiran;
4. UPT yang tidak terdapat pada lampiran, merupakan UPT yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran triwulan IV, sehingga capaian IKU-nya 80% sesuai target capaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya saudara dapat menjadikan dasar pencapaian hasil pengawasan tahun 2023.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPSDM
Sekretaris BRSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

Tembusan :
1. Kepala BPPSDM
2. Inspektur Jenderal